

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2014, *Metode penelitian Hukum*, Cetakan ke-V, Sinar Grafika, Jakarta.

Arifin, Tajul, 2008, *Metode penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.

Assiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Komentor Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang, Sunggono, 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gautama, Sudargo, 1987, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung.

Handoyo, Hestu Cipto, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.

Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ishak, Otto Syamsuddin, 2016, *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Jakarta.

Mahfud MD.,Moh., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Mahfud MD.,Moh., 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mahfud MD.,Moh., 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

MPR, 2006, *Panduan Pemesyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekjen MPR, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir , 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pasaribu, Rowland B. F., Pendidikan Kewarganegaraan.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saragih, Bintan Regen, 2006, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung.

Sinamo, Nomensen, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta.

Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, 2010, *penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Starke, J.G., 1989, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-Sembilan*, Aksara Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedomana Pembuatan Usulan penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syaukani, 2003, *Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syaukani, Imam dan A. Ahsan Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Graffindo, Jakarta, hlm. 58.

Tim Redaksi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Persada, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Nourman Dwi Wulandari, 2012, "Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur.

Ulian Deta, 2003, "Perlindungan Hukum terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kus Winarno, 2010, "Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Melani Wuwungan, 2009, "Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Tunjung Herning Sitabuana, 2011, "Penyelesaian Masalah Diskriminasi Etnis Cina, Studi tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.

D. Hasil Wawancara

Huda, Ni'matul, (Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2016. "Politik Hukum Mengenai Status Kewarganegaraan Indonesia dalam Pengangkatan Pejabat Negara Republik Indonesia". *Wawancara*, 16 Desember 2016.

Sudjito, (Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada), 2017. "Politik Hukum Mengenai Status Kewarganegaraan Indonesia dalam Pengangkatan Pejabat Negara Republik Indonesia". *Wawancara*, 07 Februari 2017.

D. Situs

Fachrudin Fachri, "Pencopotan Arcandra Dinilai untuk Hindari Masalah yang Lebih Luas", <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/15395331/pencopotan.arcandra.dinilai.untuk.hindari.masalah.yang.lebih.luas>, diakses 20 September 2016.

Wikipedia, "Pejabat Negara", https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara, diakses 4 April 2017.